

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia menjadi isu pembangunan manusia yang menarik untuk diteliti khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan manusia salah satu indikator yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pembangunan di suatu negara atau wilayah tidak hanya memperhatikan perhitungan Produk Domestik Bruto tetapi, harus memperhatikan pembangunan manusia. Jika pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi hanya bersifat jangka pendek dan tidak menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan pembangunan manusia.

Menurut Amartya Sen dalam (wahyuningsih 2020:298) menyatakan hakikat dari pembangunan adalah kebebasan sehingga pembangunan harus mampu membebaskan manusia dari kemiskinan dan tekanan dari pihak-pihak lain, dari perspektif ini pembangunan bermakna terjadinya peningkatan pembangunan akan meningkatkan martabat manusia dari masalah belenggu kemiskinan dan keterbatasan akses halal ini menjadi inti pokok dalam pembangunan manusia.

Keberhasilan pembangunan manusia di ikuti dengan Peningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai wilayah, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan pembangunan nasional, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kualitas manusia diberbagai daerah sehingga sulit tercapai kesejahteraan di masyarakat terdiri atas : (1) Komposisi jumlah penduduk, (2)

Distribusi Pendapatan Masyarakat, (2) Pola pengeluaran Masyarakat, (3) Komposisi Pendapatan Nasional, (5) Perbedaan Masa lapangan dan (6) Keadaan Pengangguran (Sukirno, 2006).

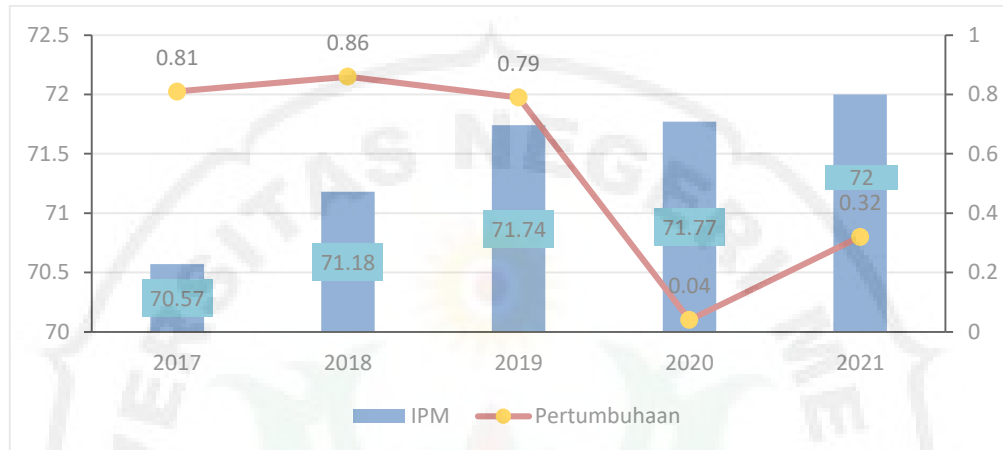
Pembangunan Manusia perlu mendapatkan perhatian, terdapat beberapa hal yang mendasari yaitu: (1) masih banyak negara khususnya negara berkembang yang berhasil memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi, belum mampu mengurangi masalah sosial, ekonomi dan kemiskinan. (2) terdapat beberapa negara yang berpendapatan rendah mampu mencapai pembangunan manusia dikarenakan pemanfaatan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dasar. (3) terdapat negara-negara maju yang belum mampu mengatasi masalah sosial seperti kriminalitas, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan tindakan kekerasan (Ramadhan, 2018).

Menurut *The United Nations Development Programme* (UNDP) pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi manusia. Memperluas pilihan yang penting yaitu memiliki umur panjang dan sehat, pengetahuan dan memiliki akses untuk sumber daya agar terpenuhinya standar hidup layak. Untuk mengukur modal manusia, *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia diberi nama *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan sebagai upaya membangun kualitas hidup manusia (Muliza et al., 2017). Terdapat 3 dimensi yang digunakan untuk mengukur IPM yaitu (1) dimensi umur panjang dan hidup sehat, (2) dimensi pengetahuan (3) dimensi standar hidup layak (BPS, 2021).

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan, kesejahteraan di suatu negara dan melihat kemampuan penduduk mengakses hasil pembangunan untuk mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM juga berguna untuk mengukur kinerja pemerintah. Terdapat kategori yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia, kategori sedang hingga rendah dapat dikatakan belum baik.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah 73.981,23  $km^2$  dengan jumlah penduduk sebesar 14.936.148 ribu jiwa di tahun 2021. Provinsi ini sebagai provinsi ke empat setelah Jawa barat, Jawa Timur dan Jawa tengah dengan kepadatan penduduk sebesar 201.89 jiwa/ $km^2$ , jumlah penduduk yang besar membutuhkan adanya pemberdayaan serta peran dari pemerintah untuk mampu mengolah investasi di bidang pendidikan sehingga menghasilkan sumber daya terampil, kompeten dan berkualitas. Peningkatan pembangunan manusia mendorong pertumbuhan perekonomian di negara maju dan berkembang. Perkembangan pembangunan manusia akan mampu menciptakan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan menentukan kemampuan suatu penduduk di wilayah tersebut untuk menyerap dan mengolah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun kelembagaan sebagai sarana pencapaian pertumbuhan ekonomi (Dewi dan I Ketut,2014).

**Gambar 1. 1**  
**IPM Sumatera Utara Tahun 2017-2021**



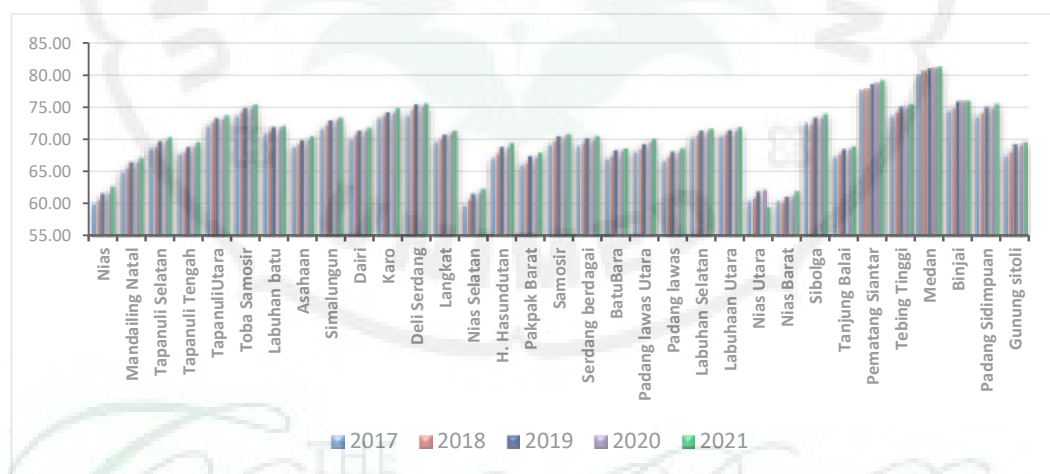
*Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah)*

Menurut data diatas IPM Sumatera Utara tahun 2017 hingga 2021. Nilai IPM tertinggi di tahun 2021 sebesar 72.00 dan terendah tahun 2017 sebesar 70.57 persen. Di tahun 2020 IPM Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang lambat sebesar 0,04 persen sedangkan tahun 2021 tingkat IPM tumbuh sebesar 0.32 persen. Meskipun IPM mengalami peningkatan tetapi, pertumbuhan IPM selama lima tahun terakhir mengalami perlambatan. Sehingga tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan (BPS, 2021). Terutama di tahun 2020 IPM Sumatera Utara hanya tumbuh 0.04 persen dan tahun 2021 tingkat IPM Sumatera Utara hanya tumbuh 0.32 persen, terjadinya perlambatan di sebabkan penyebaran Covid-19 yang semakin luas dan pembatasan kegiatan ekonomi. Selain itu, terjadi penurunan dipengaruhi ketersediaan lapangan kerja yang ditentukan dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Jika dilihat secara rata-rata indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan secara absolut akan tetapi, peningkatan tersebut belum mampu untuk

mendorong mengangkat capaian IPM yang diharapkan, jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kep. Riau, Provinsi Sumatera Utara masih tertinggal. Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat ke 14 di tahun 2020 dan peringkat ke-15 di tahun 2021 hal ini menjadi masalah, sehingga diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia terutama di daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang masih memiliki IPM yang rendah. Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

**Gambar 1. 2**  
**IPM Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah, 2022.)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2021) Sumatera Utara, Provinsi ini terdiri atas 33 Kab/Kota yaitu 8 wilayah Kota dan 25 wilayah Kabupaten, jika dilihat berdasarkan grafik di atas IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara masih terdapat IPM yang berada < 70, hal menunjukkan IPM di Kab/Kota Sumut di Kategori kan sedang. Masalah disparitas pembangunan manusia di kabupaten/kota

sulit dihilangkan, terjadinya perbedaan disparitas antar wilayah dapat dilihat dari capaian IPM di kota maupun kabupaten, disparitas pembangunan manusia akan menggambarkan kinerja pembangunan manusia di tingkat provinsi (BPS, 2020). Disparitas pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan data di tahun 2021 nilai capaian IPM di wilayah kota, capaian nilai IPM tertinggi berada di Kota Medan sebesar 81.79 % dan terendah di Kota Tanjung balai degan capaian IPM sebesar 68.94 % sedangkan untuk wilayah Kabupaten capaian nilai IPM tertinggi di Kab. Deli Serdang sebesar 75.53 % dan IPM terdapat di Kab. Nias Barat sebesar 61.14 %. Nilai Indeks Pembangunan Manusia dikategorikan sedang hingga rendah mencerminkan kualitas manusia di suatu daerah dikatakan belum baik. HDI menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia untuk mengategorikan negara maju atau negara berkembang (UNDP,1990).

Kesenjangan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di sebabkan oleh faktor standar hidup layak, pendidikan, kesehatan. Pada dimensi standar hidup layak terlihat jumlah lapangan kerja dan perusahaan. Kota Medan memiliki banyak lapangan pekerjaan dan pusat perekonomian sehingga mendorong pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer, pendidikan dan kesehatan sedangkan Kab. Nias Barat masih sedikit jumlah lapangan pekerjaan dan perusahaan hal ini sulit memperoleh pendapatan. Kesenjangan pendidikan yang terjadi Kabupaten/Kota di sebabkan kurangnya pemerataan layanan pendidikan, seperti grafik diatas Kota Medan memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dan pendukung lainnya buku, akses internet yang mudah dijangkau sedangkan Kab. Nias Barat masih memiliki sarana dan prasarana yang minim sulit di akses. Dilihat

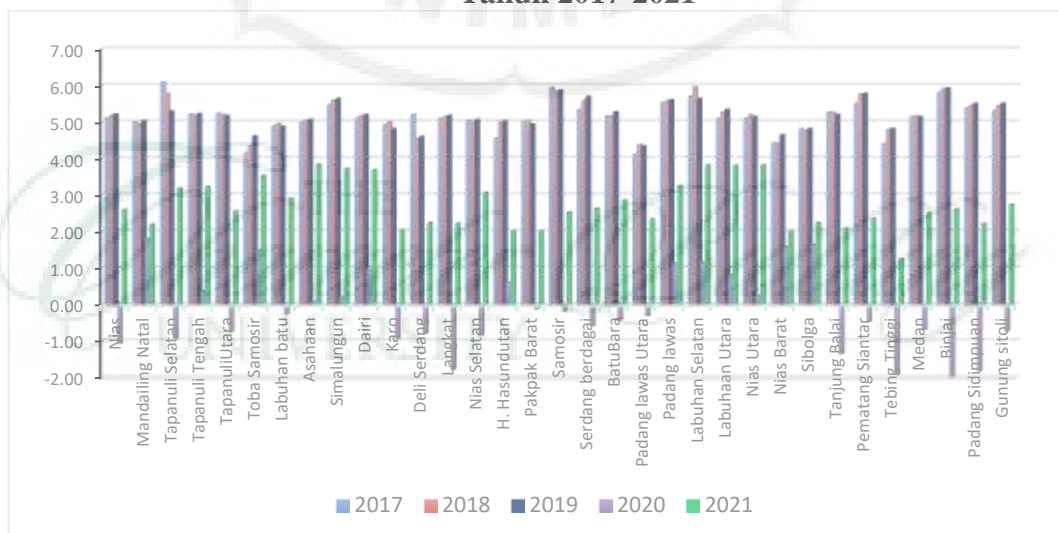
dari dimensi kesehatan terjadi perbedaan antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias, Kota Medan memiliki layanan kesehatan, klinik dan fasilitas kesehatan yang memadai berbanding terbalik dengan Nias Barat memiliki fasilitas kesehatan yang kurang memadai.

Peningkatan kualitas manusia bukan masalah yang mudah untuk diatasi karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia terutama bagi negara atau daerah dengan jumlah penduduk yang besar dan kebudayaan yang beragam serta terjadi disparitas geografi dan kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat yang menyebabkan capaian pembangunan manusia di setiap wilayah berbeda-beda sehingga pemerintah harus mampu mempertimbangkan serta memprioritaskan peningkatan pencapaian pembangunan khususnya wilayah yang capaian nya IPM nya rendah agar tidak terjadi kesenjangan sehingga tercapai pemerataan maupun peningkatan nilai IPM.

Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan rill dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan perkapita tercapainya kemakmuran ekonomi. Dengan meningkatnya kemakmuran di suatu negara/wilayah akan mendorong peningkatan pendapatan rata-rata yang diterima penduduk. Maka semakin tinggi pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat dan daya beli bertambah meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi masyarakat (Sukirno, 2006:12).

Berdasarkan teori Kuznets menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi modern sebagai hasil dari output perkapita yang tinggi. Terjadinya peningkatan output akan mendorong pola konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga terjadi perubahan maka semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan meningkatnya output perkapita yang diperoleh masyarakat dan mendorong pola konsumsi atau pengeluaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup sehingga tercapai indeks pembangunan manusia (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi memberikan keterkaitan dengan IPM, IPM berupa pengukuran kesejahteraan yang disempurnakan sedangkan pertumbuhan ekonomi sebagai pengukuran kesejahteraan yang lama (Si Nyoman & Ni Putu, 2021). Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat gambar 1.2 sebagai berikut:

**Gambar 1. 3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sumatera Utara**  
**Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah , 2022)



Berdasarkan grafik diatas terjadi variasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana kinerja dari berbagai sektor ekonomi untuk menghasilkan nilai tambah atau pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam satu periode. Jika dilihat berdasarkan data tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Kab. Asahan sebesar 3.85%, kemudian Kab. Labuhan Selatan dan Nias Utara sebesar 3.83 % di ikuti dengan Kab. Labuhan Utara 3.82 % sedangkan Pertumbuhan Ekonomi terendah di tahun 2021 di Kab. Pematang Siantar sebesar 1.25% di ikuti dengan Nias Selatan sebesar 2.02% dan Kab. Hubang Hasudutan sebesar 2.02%. Grafik diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara mengalami pergerakan lambat hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan di sektor ekonomi.

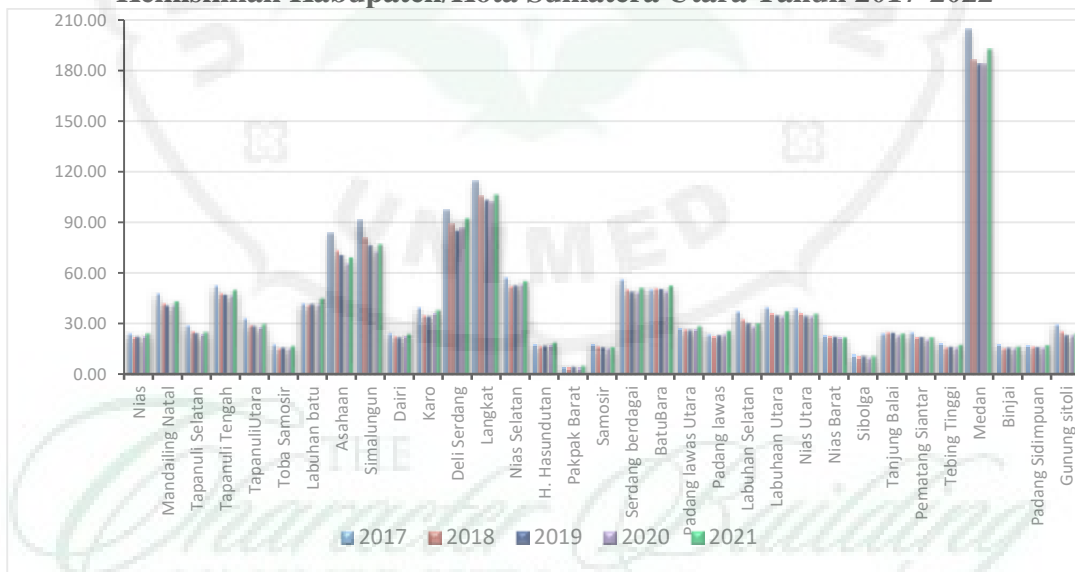
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup manusia. Masalah standar hidup akan berkaitan dengan pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak kesehatan dan tingkat pendidikan yang berakibat rendahnya sumber daya manusia dan produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka. Rendahnya pendapatan berimplikasi rendahnya tabungan dan investasi (Kuncoro, 2004).

Todaro dan Smith menyatakan bahwa jika tingkat kemiskinan tinggi menyebabkan kemampuan manusia untuk mengakses fasilitas pendidikan akan terhambat sehingga kondisi penduduk menjadi terbelakang dan buta huruf.

Kemampuan untuk memanfaatkan SDA agar produktif tidak tercapai (Todaro, 2006).

Kemiskinan menjadi masalah kompleks yang bermula dari ketidakmampuan daya beli masyarakat untuk terpenuhi kebutuhan dasar atau pokok sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan lain terabaikan seperti pendidikan, kesehatan. Dalam pandangan ekonomi jika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi akan menghasilkan kualitas SDM dan produktivitas yang rendah, Kemiskinan akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dimana, terjadinya penurunan pendapatan atau upah yang diperoleh individu yang sedang bekerja

**Gambar 1. 4**  
**Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah , 2022)

Berdasarkan grafik di atas tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera utara masih terdapat dibawah 10% hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk miskin di kabupaten/kota yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika dilihat berdasarkan data kemiskinan tertinggi Kabupaten/Kota Sumatera Utara di tahun 2021 berada di

Kota Medan sebesar 193,03 ribu jiwa, Kab. Langkat sebesar 106,59 ribu jiwa dan Kab. Deli Serdang sebesar 92.52 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah di Kab. Pak-Pak Barat sebesar 4.79 ribu jiwa, diikuti dengan Kab. Sibolga sebesar 10,80 ribu jiwa, diikuti dengan Kab. Binjai sebesar 16,46 ribu jiwa.

Terjadi perbedaan tingkat kemiskinan dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang disebabkan pendapatan diperoleh masyarakat rendah dan perbedaan kemampuan kualitas sumber daya manusia sehingga masih terdapat daerah yang memiliki penduduk miskin berada dibawah garis kemiskinan seperti Nias barat, Nias. Kemiskinan di suatu daerah akan menghambat seseorang untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, gizi buruk, kualitas penduduk yang rendah dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan Si Nyoman & Ni Putu (2021), menunjukkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, karena kemiskinan disebabkan kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok dan terabaikan kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan karena kelangkaan dari alat pemuas kebutuhan dan tidak mendapatkan akses untuk pendidikan, kesehatan.

Peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia tidak lepas dari peran pemerintah sebagai upaya pengalokasian penerimaan pendapatan daerah pada belanja daerah untuk sektor-sektor yang mampu meningkatkan Indeks pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (Hobrouw et al., 2021). Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pelimpahan ke wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Otonomi daerah akan mampu meningkatkan percepatan pembangunan karena wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pembangunan.

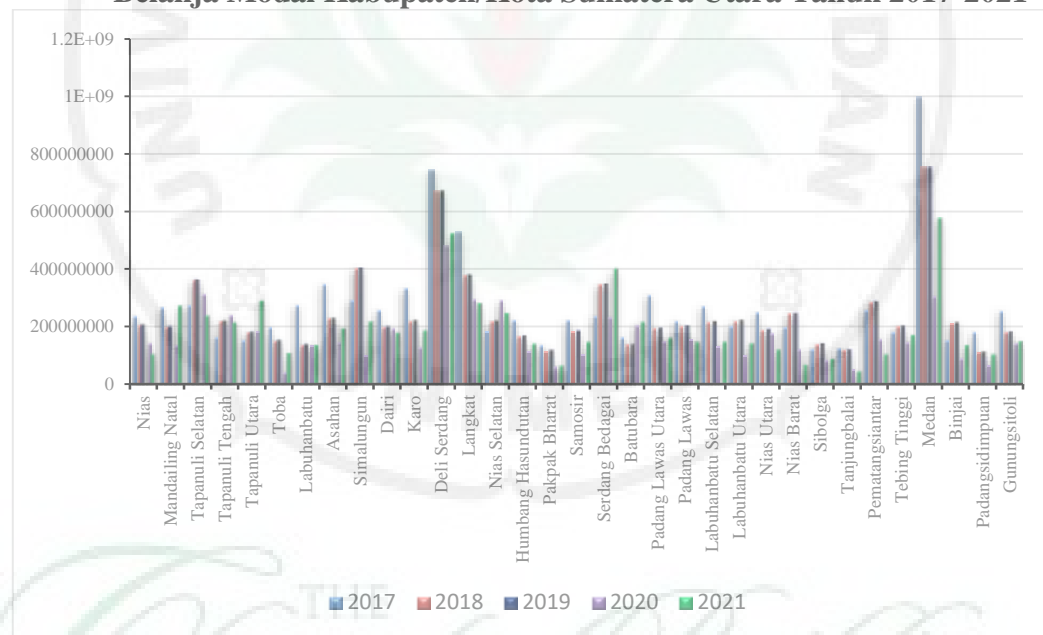
Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal disusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diharapkan mampu mendorong adanya kesejahteraan masyarakat. Belanja modal salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk merealisasikan pembangunan ekonomi di suatu daerah dengan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan di sektor publik hal ini dilakukan dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Belanja modal merupakan pengeluaran berupa pembelian/pengadaan untuk pembangunan aset berwujud yang akan memberikan masa manfaat lebih dari 12 bulan, pengeluaran ini dilakukan untuk kegiatan pemerintah seperti tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, buku perpustakaan dan aset lainnya (Khusaini, 2018:166).

Belanja modal memiliki keterkaitan dengan pembangunan manusia, hal ini sejalan dengan teori yang WW Rostow dan RA Musgrave. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara melalui tiga tahapan yaitu tahap pertama, tahap menengah, dan tahap lanjutan. Pada tahap pertama pengeluaran pemerintah cukup besar untuk menyediakan investasi dengan menyediakan sarana dan Prasarana seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi lainnya, pada tahap menengah pembangunan mulai berkembang pesat diikuti dengan investasi yang dilakukan pihak swasta, sehingga pemerintah menyediakan barang dan jasa publik, kemudian tahap terakhir Rostow menyatakan bahwa pemerintah menyediakan

sarana dan prasarana ke belanja pemerintah untuk kegiatan sosial, pendidikan dana pensiun dan kesehatan (Dumaity, 1997:165).

Belanja Modal berperan penting di suatu daerah, dengan adanya belanja modal akan mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan memperluas kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya eksternalisasi mampu meningkatkan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan dan kualitas hidup manusia sesuai dengan desentralisasi fiskal.

**Gambar 1.5**  
**Belanja Modal Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Sumatera Utara (data diolah, 2022)

Dilihat berdasarkan grafik menunjukkan bahwa, belanja modal di wilayah kabupaten/kota Sumatera utara terjadi perbedaan, di tahun 2021 belanja modal tertinggi berada di Kota Medan sebesar Rp. 574.604.617.000 diikuti dengan wilayah Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 520.913.969.000 selanjutnya Kab. Serdang Berbagai sebesar Rp. 399.621.276.000, Ketiga wilayah tersebut menempati posisi

belanja modal tertinggi di wilayah Kab/Kota Sumatera Utara. Sedangkan belanja modal terendah Kab. Tanjung balai sebesar Rp. 44.390.581.000, diikuti Kab. Nias Barat sebesar Rp. 67.159.495.000 dan Kab. Nias Utara Sebesar Rp. 87.104.769.000.

Terjadinya perbedaan belanja modal sesuai dengan kebutuhan daerah, belanja modal digunakan untuk mendorong kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pengalokasian belanja modal diharapkan mampu memberikan dampak meningkatkan perekonomian yang produktif sehingga mampu menurunkan kesenjangan vertikal dan Horizontal, serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pembangunan instruktur sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya.

Indeks pembangunan manusia perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan perekonomian di suatu daerah maupun negara sehingga Indeks pembangunan menjadi topik yang cukup menarik untuk diteliti dan dibahas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah berjudul “ **Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Indeks pembangunan Manusia menunjukkan ketimpangan dan mengalami perlambatan serta terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki nilai indeks pembangunan manusia dikategorikan kurang baik
2. Pertumbuhan Ekonomi mengalami fluktuasi dan terjadi penurunan tahun di beberapa tahun terakhir terutama di tahun 2019-2020, di tahun 2020 terjadi penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. .
3. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif terutama tahun dan terjadi peningkatan di tahun 2021.
4. Belanja modal mengalami fluktuasi terutama di tahun 2019-2020 hingga terjadi penurunan di beberapa kabupaten/kota yang menyebabkan pengalokasian belanja modal belum terlaksana tepat sasaran sehingga terjadi kesenjangan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia.

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah penelitian yang terkait dengan:

1. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti hanya membatasi permasalahan penelitian ini hanya membahas pada “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara”.
2. Objek penelitian yaitu Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.



## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan, mengembangkan pengetahuan, dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan serta sebagai sumber rujukan atau referensi dan literasi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian dilakukan untuk menambah pengetahuan, menerapkan serta mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan sekaligus sebagai tugas akhir mahasiswa di Fakultas Ekonomi UNIMED.

#### 2. Pemerintah

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam menentukan dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan *human development index* serta sebagai informasi bagi pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara